

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu. Telp : (0451) 456885, 411289, 428503

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Renja (Rencana Kerja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2026. Renja 2026 ini mengacu pada Perubahan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun.

Renja Tahun 2026 disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan industri dan perdagangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Renja Tahun 2026 diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terlaksana dengan baik, sesuai harapan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikian Renja ini disusun, diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan untuk rencana tindak kegiatan bagi seluruh aparaturnya OPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 28 Juli 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2021	7
2.1.1 Pelaksanaan APBD TA 2024	7
2.1.2 Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	48
2.2.1 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	48
2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	49
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	50
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD	50
2.3.1.1 Bidang Industri.....	50
2.3.1.2 Bidang Perdagangan.....	51
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	53
2.3.2.1 Permasalahan Urusan Perdagangan.....	53
2.3.2.2 Permasalahan Urusan Perindustrian	54
2.3.3 Tantangan dan Potensi.....	54
2.3.3.1 Tantangan dan Potensi Urusan Perdagangan.....	54
2.3.3.2 Tantangan dan Potensi Urusan Perindustrian.....	55
2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.....	55
2.3.4.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis Urusan Perdagangan.....	55
2.3.4.2 Rekomendasi dan Catatan strategis Urusan Perindustrian.....	57
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	83

3.1.1	Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian	83
3.1.2	Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan	83
3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2021.....	84
3.3	Program dan Kegiatan	89

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2025

4.1	Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	104
-----	---	-----

BAB V PENUTUP

5.1	Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian	107
5.3	Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	107
5.4	Rencana tindak lanjut	107

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024	8
Tabel 2.5 Neraca Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2024	49
Tabel 2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026	60
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	85
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	87
Tabel 3.3 Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026	89
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	93
Tabel 4.1 Usulan Program/Kegiatan Kabupaten / Kota Tahun 2026	105

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi	3

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renja SKPD penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tiap SKPD berkewajiban menyusun Renja sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional, yang berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan.

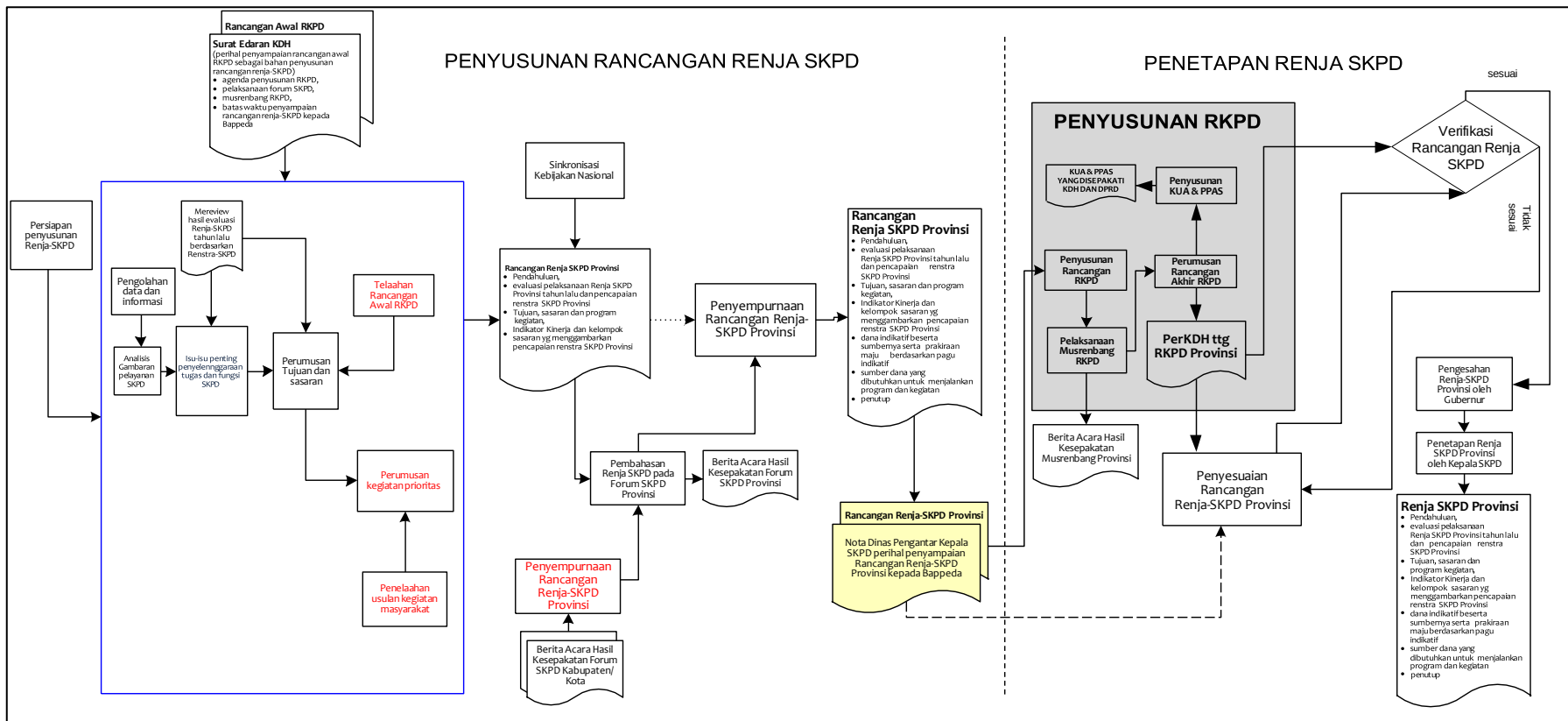
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terkecil. Renja

SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2026 diperlukan keselarasan dan kesinambungan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dimana secara teknis pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melalui dokumen Rencana Kerja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Renja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. dan penerjemahan visi, misi, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2021-2026. Disamping itu Renja SKPD Tahun 2025 ini dapat menggambarkan agenda ataupun rencana program, strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan sektor Industri dan Perdagangan. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada Tahun 2026 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi tersaji pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai :

1. Dokumen perencanaan OPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan untuk periode satu tahun bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sarana untuk melaksanakan keterpaduan pelaksanaan program dengan unit kerja lainnya melalui koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap program kegiatan dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV . Telaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab V . P E N U T U P

- 4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Pelaksanaan APBD TA 2024

Hasil pelaksanaan APBD pada Tahun 2024 dicapai berdasarkan 2 (dua) aspek yaitu anggaran dan kinerja. Pada aspek realisasi anggaran dapat dibagi menjadi APBD dan APBN. APBD 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.31.600.058.296.09 dengan realisasi Rp. 28.695.839.348 (90,81%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Belanja APBN Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp . 1.545.261.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.525.759.960 (98,74%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024 tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3)2023	Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024			target program/kegiatan (renja perangkat Daerah Tahun n-1)2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2025	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,05		66	71,80	109	68			

3	3	0	1,0		Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	BB		B	B	#VALUE!	BB			
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		1	1	100	1			

3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135		125	120	96	130			
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500		500	500	100	500			
3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12		12	12	100	12			

3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	15		15	15	100	15			
0	1	2	5	Keg.	Penyusunan	Laporan Keuangan	Akhir Tahun SKPD dan									
						Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil									
							Koordinasi									
							Penyusunan Laporan									
							Keuangan Akhir									
							Tahun SKPD									
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengelolaan dan	Jumlah Dokumen	5		5	5	100	5			
0	1	2	6	Keg.	Penyiapan Bahan	Tanggapan	Bahan Tanggapan									
						Pemeriksaan	Pemeriksaan dan									
							Tindak Lanjut									
							Pemeriksaan									
3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	14		14	14	100	14			
0	1	2	7	Keg.	Penyusunan	Laporan Keuangan	Bulanan/									
						Laporan Keuangan	Bulanan/Triwulana									
							n/Semesteran									
							SKPD dan									
							Laporan Koordinasi									
							Penyusunan Laporan									
							Keuangan									
							Bulanan/Triwulanan/S									
							emesteran SKPD									
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyusunan	Jumlah Dokumen	1		1	1	100	1			
0	1	2	8	Keg.	Pelaporan dan	Analisis Prognosis	Pelaporan dan									
						Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis									
							Realisasi Anggaran									
3	3	0	1,0		Keg.	Administrasi	Jumlah Laporan	14		14	14	100	14			
0	1	3				Barang Milik	Pengelolaan Barang									
						Daerah pada	Milik Daerah									
						Perangkat Daerah										
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengamanan	Jumlah Dokumen	10		10	10	100	10			
0	1	3	2	Keg.	Barang Milik	Daerah SKPD	Pengamanan Barang									
							Milik									
							Daerah SKPD									

3	3	0	1,0	0	Sub	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	1	100		1			
3	3	0	1,0	0	Sub	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2		2	2	100		2			
3	3	0	1,0	0	Sub	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	1	100		1			
3	3	0	1,0	0	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	B		B	B	#VALUE!		B			
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1		1	0	0		2			
3	3	0	1,0	0	Sub	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4		4	4	100		4			
3	3	0	1,0	0	Sub	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18		18	16	89		18			
3	3	0	1,0	1	Sub	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44		42	42	100		43			

3	3	0	1,0		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100		1			
0	1	6	6														
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Paket	4		4	4	100		4			
0	1	6	1		Keg.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket	4		4	4	100		4			
0	1	6	4		Keg.	Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	4		4	4	100		4			
0	1	6	5		Keg.	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen	12		12	12	100		12			
0	1	6	6		Keg.	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan										
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	78		76	50	66		77			
0	1	6	9		Keg.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
3	3	0	1,0		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60		60		0		60			
0	1	7	7														
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit	2		3	2	67		1			
0	1	7	1		Keg.	Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan										

		atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Disediakan										
3 3 0 1,0 0 0 1 7 2	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0	#DIV/0!					
3 3 0 1,0 0 0 1 7 5	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5		5	0	0	5				
3 3 0 1,0 0 0 1 7 6	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17		16	20	125	17				
3 3 0 1,0 0 0 1 7 9	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2		1	0	0	2				
3 3 0 1,0 1 0 1 7 0	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2		1	0	0	2				
3 3 0 1,0 0 1 8	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60		60	1	2	60				
			INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60				
			TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	62		62		0	62				

3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan				0	#DIV/0!			
0	1	9	2	Keg.	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
3	3	0	1,0	0	Sub	Pemeliharaan	Jumlah Mebel yang	5		5	0	0	4		
0	1	9	5	Keg.	Mebel	Dipelihara									
3	3	0	1,0	0	Sub	Pemeliharaan	Jumlah Peralatan	110		110	115	105	110		
0	1	9	6	Keg.	Peralatan dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
3	3	0	1,0	0	Sub	Pemeliharaan/Reha	Jumlah Gedung					#DIV/0!			
0	1	9	9	Keg.	bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
3	3	0	1,0	1	Sub	Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan	1		1	1	100	1		
0	1	9	0	Keg.	bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
												#DIV/0!			
								Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7,20		7,00	0	7,10		
								Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8,00		12,00	0	6,00		
3	3	0			Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	100		100		0	100		
0	2						Persetanse Pelaku	37		33		0	35		

3 3 0 1,0 0 2 2	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	100		100		0	100				
3 3 0 1,0 0 0 2 2 1	Sub Keg.	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1		1	1	100	1				
3 3 0 1,0 0 2 4	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	100		100	1	1	100				

3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1		1	1	100	1			
3	3	0				Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	10		10		0	10			
3	3	0	1,0			Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana prasaran perdagangan sesuai standar	10		10		0	10			
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2		2	2	100	2			
3	3	0				Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4-6		4-6	100	0	4-6			

3	3	0	1,0		Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100		100	11	11	100			
3	3	0	1,0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4		4	4	100	4			
3	3	0	1,0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4		4	4	100	4			
3	3	0	1,0	0	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan	90		90		0	90			

3	3	0	1,0	0	Sub	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4		4	4	100		4			
0	4	2	2	1	Keg.												
3	3	0	1,0	0	Sub	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6		6	6	100		6			
0	4	2	2	2	Keg.												
3	3	0	1,0	0	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100		100		0		100			
0	4	3	3	3													
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1		1	0	0		1			
0	4	3	3	3	Keg.												

3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1		1	1	100	1			
3	3	0			Prog.	Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	29.656,02		23.641,60	23.641,60	100	26.478,59			
3	3	0	1,0		Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	100		100		0	100			
3	3	0	1,0	0	Sub	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9		6	3	50	6			
3	3	0	1,0	0	Sub	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	30		24	24	100	30			
3	3	0	1,0	0	Sub	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2		2	2	100	2			
3	3	0			Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	10		10	20	200	10			

3 0	3 7	0 2	1,0 2		Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	10		10		0		10			
3 0	3 7	0 2	1,0 2	0 2	Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	25		25	25	100		25			
3 0	3 7	0 3	1,0 3		Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	10		10	1	10		10			
3 0	3 7	0 3	1,0 3	0 2	Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1		1	1	100		1			
							Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	42		41		0		41			
3 1	3 2	0 2			Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	10,50		10	10	105		10			

3 1	3 2	0 1	1,0 1		Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	100		100		0	100			
3 1	3 2	0 1	1,0 1	0 1	Sub Keg.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1		1		0	1			
3 1	3 2	0 1	1,0 1	0 2	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3		3	3	100	3			
3 1	3 2	0 1	1,0 1	0 3	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2		2	2	100	2			
3 1	3 2	0 1	1,0 1	0 4	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1		1	1	100	1			
3 1	3 2	0 1	1,0 1	0 5	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	1		1	1	100	1			

		Serta Masyarakat										
3 3 0 1,0 0 1 2 1 6	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1		1	1	100	1				
3 3 0 1 3	Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	73		71		0	72				
3 3 0 1,0 1 3 1	Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	73		71		0	72				

3	3	0	1,0	0	Sub	Koordinasi dan	-Jumlah dokumen hasil	1		1	1	100		1		
	1	3	1	3	Keg.	Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat									

3	3	0	1,0	0	Sub	Fasilitasi verifikasi	Jumlah dokumen	1		1	1	100	1		
1	3	1	1	4	Keg.	pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.								

3 1	3 4	0				Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	91		87	327.320. 000	376.229.885	89			
3 1	3 4	0 1	1,0 1			Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas	14		10	327.320. 000	3.273.200.00 0	12			
3 1	3 4	0 1	1,0 1	0 1		Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1		1		0	1			
3 1	3 4	0 1	1,0 1	0 2		Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1		1	1	100	1			

3	3	0	1,0	0	Sub	Pemantauan dan	Jumlah Dokumen	1		1	1	100	1			
1	4	1	3	Keg.	Evaluasi	Hasil Pemantauan	dan Evaluasi									
					Kepatuhan	Kepatuhan	Kepatuhan									
					Perusahaan Industri	Perusahaan Industri	Perusahaan Industri									
					dan Perusahaan	dan Perusahaan	dan Perusahaan									
					Kawasan Industri	Kawasan Industri	Kawasan Industri									
					Lingkup Provinsi	Lingkup Provinsi	Lingkup Provinsi									
					dalam	dalam	dalam									
					Penyampaian Data	Penyampaian Data	Penyampaian Data									
					ke SIINas	ke SIINas	ke SIINas									
												#DIV/0!		0		0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3)2023	Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024			target program/kegiatan(renja perangkat Daerah Tahun n-1)2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2025	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 3 0 0 1	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,05		66		0	68			
3 3 0 1,0 0 1 2	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
3 3 0 1,0 0 0 1 2 2	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1			
3 3 0 1,0 0 1 3	Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1		1	1	100	1			
3 3 0 1,0 0 0 1 3 5	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4		4		0	4			
3 3 0 1,0 0 0 1 3 6	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4		4		0	4			
3 3 0 1,0 0 1 5	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
3 3 0 1,0 0 0 1 5 9	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8		8		0	8			
3 3 0 1,0 0 1 6	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			

3 0	3 1	0 6	1,0 1	0 1	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 0	3 1	0 6	1,0 2	0 2	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 0	3 1	0 6	1,0 4	0 4	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		1		0	1			
3 0	3 1	0 6	1,0 5	0 5	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 0	3 1	0 6	1,0 8	0 8	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		1		0	1			
3 0	3 1	0 6	1,0 9	0 9	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		1		0	1			
3 0	3 1	0 7	1,0 7		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
3 0	3 1	0 7	1,0 1	0 1	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		0		#DIV/0!	0			

3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1		0		#DIV/0!	0			
0	1	7	2		Keg.											
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		1	1	100	1			
0	1	7	5		Keg.											
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		6	7	117	6			
0	1	7	6		Keg.											
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-		#VALUE!	-			
0	1	7	9		Keg.											
3	3	0	1,0	1	Sub	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-		#VALUE!	-			
0	1	7	0		Keg.											
3	3	0	1,0		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
0	1	8					INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
							TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62		62		0	62			

3	3	0	1,0	0	0	Sub	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	0	Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3	3	0	1,0	0	0	Sub	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-		#VALUE!	-			
3	3	0	1,0	0	0	Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1		0	1			
3	3	0	1,0	0	0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1		0	1			
								Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					#DIV/0!				
3	3	0	1,0	0	0	Sub	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4		4		0	4			

					Dinas Jabatan															
3 0	3 1	0 9	1,0 2	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4		4		0	4							
3 0	3 1	0 9	1,0 5	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8		8		0	8							
3 0	3 1	0 9	1,0 6	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7		7		0	7							
3 0	3 1	0 9	1,0 9	0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		0	1							
3 0	3 1	0 9	1,0 0	1	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2		0	0							
						Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7,20		7,00		0	7,10								
						Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8,00		12,00		0	6,00								

3 3 0 0 6	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	100		100	100	100	100			
3 3 0 1,0 0 6 2	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	100		100	77	77	100			
3 3 0 1,0 0 0 6 2 4	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	165		348	150	43	160			
3 3 0 1,0 0 0 6 2 5	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1			1	#DIV/0!	1			
3 3 0 1,0 0 0 6 2 6	Sub Keg.	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	4		2		0	4			
3 3 0 1,0 0 0 6 2 7	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembag a Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifika t Inspeksi yang Diterbitkan	2		2	2	100	2			
PSMB												

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)T ahun 2026	Realis asi Targe t Kiner ja Hasil (n- 3)202 3	Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	target program/kegiata n(renja perangkat Daerah Tahun n- 1)2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan	Catatan
------	----------------------	--	---	--	--	--	--	---------

					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2025	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,05		66		0	68			2.500.000 .000
3 3 0 1,0 0 1 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
3 3 0 1,0 0 0 1 2 2	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1			
3 3 0 1,0 0 1 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah					#DIV/0!				
3 3 0 1,0 0 0 1 3 5	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	#DIV/0!				
3 3 0 1,0 0 0 1 3 6	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	#DIV/0!				

3 3 0 1,0 0 1 5	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	60		60	0	0	60			
3 3 0 1,0 0 0 1 5 9	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					#DIV/0!				
3 3 0 1,0 0 1 6	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1		1		0	1			
3 3 0 1,0 0 0 1 6 1	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2		2	2	100	2			
3 3 0 1,0 0 0 1 6 2	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		2	2	100	2			
3 3 0 1,0 0 0 1 6 4	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					#DIV/0!				
3 3 0 1,0 0 0 1 6 5	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 3 0 1,0 0 0 1 6 8	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		1	1	100	1			

3 3 0 1,0 0 0 1 6 9	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		1		0		1			
3 3 0 1,0 0 1 7	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60		60		0		60			
3 3 0 1,0 0 0 1 7 1	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					#DIV/0!					
3 3 0 1,0 0 0 1 7 2	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					#DIV/0!					
3 3 0 1,0 0 0 1 7 5	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					#DIV/0!					
3 3 0 1,0 0 0 1 7 6	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		6		0		6			
3 3 0 1,0 0 0 1 7 9	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	#VALUE!		-			-
3 3 0 1,0 1 0 1 7 0	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					#DIV/0!					

3	3	0	1,0		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
0	1	8					INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60		60		0	60			
							TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62		62		0	62			
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					#DIV/0!				
0	1	8		1	Keg.											
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		2	2	100	2			
0	1	8		2	Keg.											
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					#DIV/0!				
0	1	8		3	Keg.											
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1			
0	1	8		4	Keg.											
3	3	0	1,0		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100		100		0	100			
0	1	9														

		Urusan Pemerintahan Daerah										
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		1	1	100		1		
3 3 0 1,0 0 0 1 9 1	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8		8	8	100		8		
3 3 0 1,0 0 0 1 9 2	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					#DIV/0!				
3 3 0 1,0 0 0 1 9 5	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					#DIV/0!				
3 3 0 1,0 0 0 1 9 6	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40		40	35	88		40		
3 3 0 1,0 0 0 1 9 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2	0	0		2		

3 3 0 1,0 1 0 1 9 0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1		1	1	100	1			
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	42		41		0	41			
3 3 0 0 2	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	100		100	100	100	100			
3 3 0 1,0 0 2 1	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Fasilitasi/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	100		100	100	100	100			
3 3 0 1,0 0 0 2 1 5	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2		2	2	100	2			
p2ipk												

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)T ahun 2026	Realis asi Targe t Kiner ja Hasil (n- 3)202 3	Target Kinerja Dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	target program/kegiata n(renja perangkat Daerah Tahun n- 1)2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan	Catatan
------	----------------------	--	---	--	--	--	---	---------

									Tahun Berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d (n-1)2025	Tingkat Capaian Target Realisasi Renstra %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,05		66			68			
3 3 0 0 1 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60		60			60			
3 3 0 0 1 2 2	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1			1			
3 3 0 1 1 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1		1			1			
3 3 0 1 1 3 5	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1			1			

3	3	0	1,0	0	Sub	Penatausahaan	Jumlah Laporan								
1	1	3	3	6	Keg.	Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
3	3	0	1,0		Keg.	Administrasi	INDEKS	60		60			60		
0	1	5	5			Kepegawaian Perangkat Daerah	PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH								
3	3	0	1,0	0	Sub	Pendidikan dan	Jumlah Pegawai	3		3			3		
0	1	5	5	9	Keg.	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
3	3	0	1,0		Keg.	Administrasi	Jumlah dokumen	1		1			1		
0	1	6	6			Umum Perangkat Daerah	ketatausahaan dan kepegawaian								
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Paket								
0	1	6	6	1	Keg.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan								
0	1	6	6	2	Keg.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket								
0	1	6	6	4	Keg.	Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
3	3	0	1,0	0	Sub	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	1		1			1		
0	1	6	6	5	Keg.	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								
3	3	0	1,0	0	Sub	Fasilitas	Jumlah Laporan								
0	1	6	6	8	Keg.	Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu								

3	3	0	1,0	0	Sub	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	1		1				1			
0	1	6	9		Keg.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
3	3	0	1,0		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60		60				60			
0	1	7															
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit	1		1				1			
0	1	7	1		Keg.	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit										
0	1	7	2		Keg.	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan										
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan										
0	1	7	5		Keg.												
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		5				5			
0	1	7	6		Keg.	Peralatan dan Mesin Lainnya											
3	3	0	1,0	0	Sub	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-		-		-			
0	1	7	9		Keg.												
3	3	0	1,0	1	Sub	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1		1				1			
0	1	7	0		Keg.												

		Lainnya	yang Disediakan									
3 3 0 1,0 0 1 8	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60		60			60			
			INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60		60			60			
			TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62		62			62			
3 3 0 1,0 0 0 1 8 1	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		1			1			
3 3 0 1,0 0 0 1 8 2	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		1			1			
3 3 0 1,0 0 0 1 8 3	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
3 3 0 1,0 0 0 1 8 4	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									
3 3 0 1,0 0 1 9	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1			1			

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
							Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		1				1					
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1		1			1					
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara											
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5		5			5					
3	3	0	1,0	0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	1		1			1					

3 3 0 1,0 1 0 1 9 0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1			1			
			Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7,20		7,00			7,10			
			Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8,00		12,00			6,00			
3 3 0 0 6	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100		100			100			
3 3 0 1,0 0 6 1	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan	100		100			100			
3 3 0 1,0 0 0 6 1 1	Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	5		4			4			
3 3 0 1,0 0 0 6 1 2	Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1		1			1			
3 3 0 1,0 0 0 6 1 3	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	46		42			44			

		Sengketa Konsumen										
3 3 0 1,0 0 6 3	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan	100		100			100			
3 3 0 1,0 0 0 6 3 3	Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2		2			2			
3 3 0 1,0 0 0 6 3 4	Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	10		8			8			
p2k								0				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Pembangunan dalam bidang perdagangan sangat penting dilakukan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Selama Januari-Desember 2024, total nilai ekspor tercatat US\$ 21.337,24 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 21.236,86 juta dan provinsi lain sebesar US\$ 100,38 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$ 13.629,79 juta atau 63,88 % dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$13.629,79 juta atau 63,88 %, bahan bakar mineral senilai US\$3.406,67 juta atau 15,97 %, dan nikel senilai US\$3.170,49 juta atau 14,86 %. Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2024, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang.

perdagangan Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 tersaji pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Neraca Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2018-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor	7.480,65	7.480,65	19.016,73	19.345,57	21.236,86
Impor	2.384,94	2.384,94	10.357,2	9.163,72	10.796,39
NeracaPerdagangan	5.095,71	5.095,71	8.659,53	10.181,85	10.440,47

Sumber : BPS Sulteng 2025

2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2024 yang dilaksanakan melalui indikator kinerja kunci untuk pertumbuhan industri besar dari target 7,8 persen terealisasi sebesar 24,26 persen, dengan persentase capaian sebesar persen.

Sedangkan untuk indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Tengah, capaian kinerjanya telah melampaui target yang diharapkan dalam Renja 2024 dengan target sebesar 11,59 persen, dengan realisasi mencapai sebesar 6,41 persen. Dari hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 secara umum capaian kinerja urusan Perindustrian telah melampaui target.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2024 tersaji pada tabel 2.6 berikut

tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2024

N O	Indikator	IK K	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian				
			201 9	202 0	2021	2022	2023	2019	2020	202 1	2022	2023
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Aspek Pelayanan Umum											
	Pelayanan Urusan Pilihan											
	Perdagangan											
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		10,59	10,99	6,70	6,80	5,8	20,07	7,07		5,71	5,82
2	Ekspor bersih perdagangan (jt USD)		1000	1100	3.828,92	5.203,94	9.525,7	2.758,55	5.095,71		8.659,74	10.222,22
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)				4-6	4-6	4-6				7,9	6,90
5	Inflasi pangan bergejolak (%)				3-5	3-5	3-5				4,14	5,98
	Urusan Perindustrian											
6	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)				11,37	11,69	32,00				37,59	40,37

7	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)				1,097	1,371	13,00				13.359,62	17.116,22
8	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)				67,823	67,911	134,49				133.240	134,9
9	Cakupan bina pelaku IKM (persen)				13,83	11-14	11-14				12,43	15,23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2.3.1.1 Bidang Industri

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disperindag, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
4. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.

5. Perlu dilakukan pendataan yang valid dan menyeluruh terutama tentang jumlah IKM di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan melakukan pemetaan IKM-IKM unggulan daerah.
6. Perlu pendataan perusahaan dan IKM besar yang mampu dan layak agar mampu di masukan kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
7. Izin makanan dalam negeri rumah coklat belum dapat di terbitkan karena gedung sebagai tempat produksi harus di renovasi dan kedepannya makanan dalam negeri tersebut dapat segera diterbitkan.
8. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM aparatur pembina teknis/tenaga teknis teknis/operator mesin produksi baik rumah coklat, rumah tenun maupun rumah kemasan yang ada di provinsi/kabupaten/kota.

2.3.1.2 Bidang Perdagangan

1. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
4. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.
5. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan oleh tingkat inflasi yang terkendali, terutama inflasi kelompok bahan makanan melalui pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok

6. Revitalisasi sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dengan menjadikan pedagang di pasar-pasar barometer baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dapat di jadikan sebagai big data dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Terdapat beberapa kendala operasional dalam pelaksanaan sistem resi gudang, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gudang dan sarana prasarana penunjang, terutama pengelola gudang, akses pemasaran terhadap produk resi gudang serta ketersediaan lembaga pembiayaan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi kebijakan terkait implementasi sistem resi gudang antara pemerintah pusat dan daerah terutama dukungan dan komitmen pemerintah daerah.
8. Melakukan koordinasi pengawasan provinsi dan kabupaten dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah.
9. Dalam rangka memaksimalkan pembentukan unit kemetrologian legal provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah didorong untuk menjadi fasilitator dalam penyusunan kerja sama.
10. Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih pro aktif dalam proses pengajuan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik itu pengelola pasar, pedagang, maupun konsumen salah satunya dengan melakukan “Program Pelatihan Tektik Pengelolaan Pasar”.
11. Pemerintah provinsi diharapkan turut memantau pembangunan pasar rakyat oleh pemerintah kabupaten dan kota yang telah mendapatkan bantuan tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
12. Dalam rangka meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengembangan produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing, yang dilakukan melalui strategi menentukan produk unggulan yang berorientasi ekspor berdasarkan sektor prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah;

13. Meningkatkan mutu produk ekspor dapat dicapai melalui peningkatan kelembagaan mutu di provinsi dan peningkatan pengawasan mutu.
14. Peningkatan akses dan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri meliputi:
 - a. Pangsa pasar produk Sulawesi Tengah di pasar domestik
 - b. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi utama
 - c. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi prospektif

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi yang dipandang sebagai kelemahan dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi, antara lain:

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Perdagangan

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi;
2. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat khususnya di daerah yang rawan gempa, tsunami dan likufaksi harus mempertimbangkan dan memperhatikan zona aman bencana yang telah ditetapkan oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) atau RTRW Provinsi Sulawesi Tengah;
3. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang, olehnya itu di harapkan kepada kabupaten/kota agar dapat mengusulkan komoditas unggulan daerahnya untuk dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikasi mutu, sesuai dengan standar pengujian yang ada di UPT. PSMB.
4. Perlunya komunikasi yang intens Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengenai usulan program kegiatan kabupaten/kota yang didanai oleh dana DAK melalui aplikasi Krisna Simlaras di BAPENAS agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penetapan rekomendasi usulan.

5. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);
6. Perubahan regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perdagangan yang berlangsung cepat;
7. Rendahnya pemahaman, tahapan, dan regulasi perizinan oleh pemilik usaha;

2.3.2.2 Permasalahan Urusan Perindustrian:

1. Rendahnya daya saing, kualitas, dan inovasi produk industri
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku usaha
3. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang, berpengaruh terhadap harga jual produk;
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai
5. Minimnya biaya operasional pembinaan dan pendataan serta informasi yang valid dan up to date terkait dengan pelaku usaha
6. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;
7. Rendahnya produktivitas dan efisiensi serta desain produk industri.
8. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastaan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
9. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.3 Tantangan dan Potensi

2.3.3.1 Tantangan dan Potensi Urusan Perdagangan

1. Arus distribusi bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah lancar.
2. Ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat terjamin.
3. Kondisi keamanan daerah yang aman dan kondusif.
4. Iklim investasi yang mendukung .

5. Revitalisasi pasar.
6. Penguatan kapasitas SDM untuk usaha informal.
7. Adanya sarana publikasi dan promosi tingkat nasional.

2.3.3.2 Tantangan dan Potensi Urusan Perindustrian

1. Potensi bahan baku cukup memadai.
2. Banyak instansi/lembaga yang menyalurkan bantuan.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas Tahun 2026 dapat diformulasikan sebagai berikut :

2.3.4.1 Rekomendasi dan catatan strategis Urusan Perdagangan

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pengawasan Peredaran Barang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun karena keterbatasan manusia dan anggaran pada pemerintah provinsi, dimungkinkan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota dapat melakukan pengawasan barang atau jasa melalui pintu pengawasan BDKT atau pengawasan dalam rangka Perlindungan Konsumen.
2. Dalam rangka menstabilkan harga komoditi pertanian, perkebunan dan lain-lainnya, direkomendasikan dinas perindustrian dan perdagangan menindak lanjuti MOU antara Gubernur dengan Bupati terkait pengujian mutu di UPT. PSMB yang ada di Provinsi.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengawasan tanda daftar Gudang dan diharapkan kepada daerah melakukan pendaftaran Gudang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Pembangunan Pasar DAK (dana alokasi Khusus) maupun Tugas Pembantuan (TP), diharapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan hal tersebut kiranya Kabupaten/Kota dapat memberikan data Pasar yang telah ber-SNI pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

5. Pasar Murah wajib dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dalam rangka merayakan hari besar ke-Agamaan Nasional.
6. Pelaksanaan Tera-tera ulang terhadap UTTP diharapkan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota sudah melakukan MOU dengan Pemda Kota Palu dan mendorong agar segera menyiapkan sumber daya manusia Kemetrolagian dan sarana perasarana untuk melaksanakan Tera-Tera Ulang sendiri.
7. Kabupaten/Kota dapat mendukung program Sistem Perdagangan Antar Pulau dengan memberikan data valid yang dapat dipertanggung jawabkan termasuk penginputan data Pelaku Usaha, Distributor, Sub-Distributor, dan Agen Bahan Pokok pada Tanda Daftar Perusahaan Usaha Distribusi (TDPUD).
8. Dibutuhkan data potensi komoditi yang dapat diekspor, agar hal tersebut dapat disampaikan kepada “buyer” pada kegiatan TEI (*Trade Expo Indonesia*). Data yang disajikan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
9. Dalam rangka mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing ekspor, maka diharapkan kepada seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah segera menyusun data potensi komoditi ekspor daerahnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
10. Data potensi komoditi tersebut juga akan digunakan pada misi dagang mendatang sehingga produk unggulan Sulawesi Tengah dapat diperkenalkan pada pertemuan misi dagang tersebut.
11. Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPT. PSMB) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, karenanya diharapkan kepada Kabupaten/Kota agar dapat mengusulkan komoditas unggulan daerahnya untuk dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikasi mutu, sesuai dengan standar pengujian yang ada di UPT. PSMB.
12. Laboratrium UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan salah satu Laboratrium Pengujian Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Pengujian Komoditi yang telah terakreditasi terdiri dari 8 ruang lingkup, yaitu

Biji Kakao, Beras, Gabah, Jagung, Kopra, Rumput Laut Cengkeh dan Biji Kopi. Untuk tahun 2018 ini, Laboratrium Pengujian akan menambah ruang lingkup pengujian akreditasi yaitu CPO (Crude Palm Oil/ Minyak Sawit Mentah, Bawang Merah, dan Derajat Sosoh Beras.

13. Dalam perkembangan saat ini, Laboratrium Pengujian UPT. PSMB juga dapat melakukan pengujian di luar ruang lingkup akreditasi dan melakukan kalibrasi alat ukur, antara lain : Garam, Minyak Nilam, Kakao Bubuk, Tepung Terigu dan Cemaran Logam, yang meliputi : hasil Pertanian, hasil Perikanan, hasil Perkebunan, Produk Hasil Olahan, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Mainan Anak, Pakaian Anak, dll. Untuk pelaksanaan tugas Kalibrasi Alat Ukur Besaran kalibrasi yaitu : Dimensi, Massa, Suhu, Volumetrik
14. Sejak tahun 2015 telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengenai peningkatan standar mutu komoditi. Untuk kabupaten/kota lainnya agar dapat melakukan penguatan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan masih banyaknya komoditi yang belum berstandar nasional.

2.3.4.2 Rekomendasi dan catatan strategis Urusan Perindustrian

1. Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan bahwa setiap Gubernur, Bupati, dan Walikota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037, sementara dalam tahapan di Kemendagri. Perda RPIP akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tengah untuk segera menyusun Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
2. Bagi kabupaten yang belum melakukan penyusunan RPIK agar segera dapat memulai dan melakukan penyusunan RPIK untuk keberlanjutan mendapatkan DAK sektor industri.
3. Kabupaten dan kota yang telah dan sedang melaksanakan kegiatan DAK SIKIM agar mempersiapkan laporan pelaksanaan DAK SIKIM.

4. Dalam rangka memfasilitasi permasalahan tentang organisasi UPT di dalam SIKIM yang merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemda, bahwa keberadaan SIKIM di kabupaten untuk membentuk UPT.
5. Dukungan koordinasi dan fasilitas dalam bentuk Bimtek dan Sosialisasi tantangan Penerapan Standar Mutu Industri dari Perindag Provinsi kepada Kab. dan Kota yang mendapatkan DAK SIKIM di sesuaikan dengan jenis SIKIM yang ada di kabupaten dan kota.
6. Adanya dukungan fasilitas baik Dinas Perindag Provinsi dan Kementerian Perindustrian terhadap ketersediaan SKKNI yang di sesuaikan dengan jenis sentra yang ada di Kabupaten dan Kota.
7. Terdapat 3 (Tiga) Kabupaten yang hanya mencantumkan nomenklatur dinas perdagangan, agar segera bisa meninjau kembali perubahan nomenklatur dinas yang memuat arah pembangunan sektor industri, karena tanpa nomenklatur Perindustrian maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan DAK Sektor Industri.
8. Untuk menumbuhkan Wirausaha Baru di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang Berbasis Teknologi Informasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi berkewajiban memberikan pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda atau pelaku IKM tentang mempromosikan Produk IKM atau membentuk Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) dengan tujuan utama untuk mencetak wirausaha baru di bidang teknologi informasi.
9. Penguatan Usaha Sektor Perdagangan
Pengembangan perdagangan yang berbasis sumber daya alam lokal dan menyerap tenaga kerja cukup tinggi, menghasilkan nilai tambah yang cukup besar, berfungsinya mekanisme pasar tanpa distorsi sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk meningkatkan pengadaan dan penyaluran barang, ekspor nonmigas, memberdayakan pelaku usaha agar produktif dan berdaya saing.
10. Peningkatan Daya Saing

Penguatan pilar-pilar otonomi dalam fungsi perencanaan pembangunan daerah antara lain dalam bentuk penerapan pendekatan pembangunan sektor perdagangan untuk mencari dan menetapkan potensi unggulan dan prospektifnya, menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha untuk menanamkan dan mengembangkan produksi, pemberian insentif dan kemudahan. Selain itu peningkatan nilai tambah produksi yang telah ada yang memiliki ciri khas dan unggul melalui penerapan teknologi maju dan tepat akan dapat meningkatkan daya saing produk Sulawesi Tengah di pasar regional, nasional dan global.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 tersaji pada tabel 2.7 berikut:

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL KEBUTUHAN BERDASARKAN KUA-PPAS				
Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
4		5		18	19	4		5	18	19
Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70.05	20,034,600,000	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	20,034,600,000
Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag		BB		Keg.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	BB	
Sub Keg.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1		Sub Keg.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah		1		Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	1	
Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60	

Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		135		Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1		Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		500		Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500	
Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12		Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	
Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		5		Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	
Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14		Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	
Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1		Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	
Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		14		Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14	
Sub Keg.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		10		Sub Keg.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	
Sub Keg.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1		Sub Keg.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2		Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	

Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1		Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1		Sub Keg.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	
Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4		Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	
Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		18		Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	
Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		44		Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44	
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4		Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4		Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4		Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12		Sub Keg.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		78		Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78	
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60	

Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2		Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5		Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17		Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	
Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2		Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	
Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2		Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60	
		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		60				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60	
		TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH		62				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4		Sub Keg.		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	

Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		36		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5		Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		110		Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
		Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)		7.20				Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7.20	
		Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)		8.00				Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8.00	
Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan		100	490,090,000	Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	100	490,090,000
		Persetanse Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri		37				Persetanse Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	37	

Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani		100	109,799,900	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	100	109,799,900
Sub Keg.	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1		Sub Keg.	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	
Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani		100	380,285,264	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	100	380,285,264
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1	
Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar		10	217,490,000	Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	10	217,490,000
Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar		10	217,490,000	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase sarana prasarana perdagangan sesuai standar	10	217,490,000
Sub Keg.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		1		Sub Keg.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1	
Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		2		Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2	

Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		4-6	2,597,740,000	Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4-6	2,597,740,000
Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		100	407,448,400	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	100	407,448,400
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		4		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		4		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4	
Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan		90	2,054,477,024	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Kinerja Kontributor SP2KP Kab/Kota per bulan	90	2,054,477,024
Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		4		Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4	
Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		6		Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6	

Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi		100	135,816,100	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100	135,816,100
Sub Keg.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		1		Sub Keg.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1	
Prog.	Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor		29,656.02	1,003,160,000	Prog.	Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	29,656.02	1,003,160,000
Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi		100	1,003,160,000	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	100	1,003,160,000
Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		9		Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9	
Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal		30		Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	30	
Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		2		Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2	
Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri		10	217,170,000	Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan Pemasaran produk dalam negeri	10	217,170,000
Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri		10	92,218,800	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	10	92,218,800

Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		25		Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	25	
Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri		10	124,950,854	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	10	124,950,854
Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		1		Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas		42				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	42	
Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas		10.50	1,363,760,400	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	10.50	1,363,760,400
Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)		100	1,363,760,400	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Capaian sasaran rencana pembangunan industri provinsi (RPIP)	100	1,363,760,400
Sub Keg.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1		Sub Keg.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	
Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		3		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	
Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		2		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	
Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	
Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	

Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1		Sub Keg.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	
Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri		73	418,040,000	Prog.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	73	418,040,000
Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri		73	418,040,000	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase pengawasan dan pengendalian izin usaha Industri	73	418,040,000
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1	
Sub Keg.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.		1		Sub Keg.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1	

Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas		91	472,770,000	Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan perusahaan industri Besar dan perusahaan Kawasan Industri lintas Kab/Kota yang masuk dalam SIINas	91	472,770,000
Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas		14	472,770,000	Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase data informasi Industri kewenangan provinsi yang masuk SIINas	14	472,770,000
Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi IndustriNasional (SIINas)		1		Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi IndustriNasional (SIINas)	1	
Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		1		Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1	
Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsidalam Penyampaian Data ke SIINas		1		Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsidalam Penyampaian Data ke SIINas	1	
					26,814,820,400					26,814,820,400

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
4		5		18	19	4		5	18	19
Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70.05	2,500,000,000	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	2,500,000,000

Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1		Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1		Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	
Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4		Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	
Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4		Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	
Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		8		Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1		Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1		Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	

Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0		Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1		Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1		Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6		Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	
Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60	
		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		60				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60	
		TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH		62				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	

Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		4		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	
Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		8		Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7		Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	
		Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)		7.20				Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7.20	
		Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)		8.00				Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8.00	
Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan		100	1,035,220,000	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	100	1,035,220,000
Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan		100	1,035,220,000	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sertifikat pegujian dan kalibrasi yang diterbitkan	100	1,035,220,000

Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		165		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	165	
Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		1		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	1	
Sub Keg.	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau		4		Sub Keg.	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	4	
Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan		2		Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	2	
					3,535,220,000					3,535,220,000

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan		Indikator Kinertja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
4		5		18	19	4		5	18	19
Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70.05	2,500,000,000	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	2,500,000,000
Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1		Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah				Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	60	

Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2		Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2		Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1		Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1		Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6		Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	

Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60	
		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		60				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60	
		TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH		62				TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		100		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100	
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	

Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40		Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi		1		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1	
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas		42				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	42	
Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Fasilitas/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan		100	785,879,600	Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Fasilitas/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	100	785,879,600
Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Fasilitas/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan		100	785,879,600	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Fasilitas/Layanan dan Bina IKM Pangan, Kerajinan dan Kemasan	100	785,879,600
Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2	
					3,285,879,600					3,285,879,600

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana
4	5		18	19	4	5	18	19

Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		70.05	2,500,000,000	Prog.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05	2,500,000,000
Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1		Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	
Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1		Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	
Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1		Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDEKS PROFESIONAL ASN PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3		Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1	
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1		Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60	
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1		Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	
Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5		Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	
Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	-	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1		Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH		60		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDEKS SPBE PERANGKAT DAERAH	60	
		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH		60				INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60	

		TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH		62			TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PERANGKAT DAERAH	62	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		1		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1		Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5		Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5

Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi		1		Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	1	
		Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)		7.20				Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7.20	
		Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)		8.00				Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) (%)	8.00	
Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		100	1,035,220,000	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	1,035,220,000
Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan		100	517,610,000	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang terselesaikan	100	517,610,000
Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		5		Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	5	
Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		1		Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1	
Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		46		Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	46	
Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan		100	517,610,000	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sudah sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	100	517,610,000
Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		2		Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2	

Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani		10		Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	10	
					3,535,220,000					3,535,220,000
					37,171,140,000					37,171,140,000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian antara lain:

1. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni. Pengembangan industri industrial vegetable oil / industrial lauric oil (IVO/ILO), dimana IVO/ILO merupakan hasil pemrosesan CPO yang menurunkan kadar getah dan metal.
2. Kegiatan prioritas dalam rangka penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Koperasi. Pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) dan mengembangkan produk IKM.
3. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Melakukan pendampingan pada pabrik untuk meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah ajang temu bisnis Internasional.
4. Kegiatan prioritas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0. Kemenperin berencana mengembangkan data industri 4.0 dan pembangunan pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0.
5. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing SDM. Hal tersebut akan dilakukan melalui pelatihan industri berbasis kompetensi dan pendidikan vokasi dan kejuruan industri berbasis kompetensi menuju dual system.
6. Program Pelaksanaan Anti Korupsi.

3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Pembangunan dan revitalisasi 119 unit pasar rakyat tipe C dan D.
2. Membangun pusat jajanan dan souvenir.
3. Menjalankan Program perlindungan konsumen.
4. Program optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang.
5. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting.

6. Pelaksanaan EXPO
7. Melaksanakan program misi dagang, pameran, dan promosi luar negeri.
8. Program untuk perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
9. Program pemberian fasilitas perizinan dan fasilitas ekspor impor.
10. Program pengembangan sarana dan prasarana Kemendag.
11. Program pengembangan sumber daya manusia Kemendag.
12. Program pelaksanaan anti Korupsi.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
 2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.
- Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan umum dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%

		2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,05	64,5	66,5	68,5	70	71

Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
MISI : Transformasi Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			2 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	1 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			2 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi

			perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	1 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			2 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
MISI : Transformasi Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	1 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			2 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	1 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			2 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data	1 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

		perusahaan industri	2 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri
--	--	---------------------	---

3.3 Program dan Kegiatan

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 program dengan pagu anggaran tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

No.	Program	Pembiayaan (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,039,941,755	
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3,585,879,600	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,597,740,000	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	217,490,000	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	217,169,600	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2,870,439,600	
7	Pogram Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	690,085,100	
8	Program Pengembangan Ekspor	1,333,160,000	
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	518,040,000	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	572,770,000	
	Jumlah Dinas	32,642,715,655	

Pada Tahun 2024 pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar

32,119,116,666 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Bidang Fasilitas dan Informasi Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang pembinaan dan Pengembangan Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha

Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

- **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

- **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH						22.112.059.277,29							23.922.874.882,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.112.059.277,29							23.922.874.882,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						20.930.851.477,29							22.665.062.957,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						18.369.675.927,29						-	20.050.301.177,00	
		[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73.0	71.80	72	72.2	18.369.675.927,29	-	-	-	-	-	-	20.050.301.177,00	-
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	-			86,05 Nilai Indeks	301.140.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	-	731.966.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	215.527.200,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIHPERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		543.350.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	13.735.350,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAPATANASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIHPERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		10.824.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		6.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.300.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		6.150.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		5.976.550,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	52.944.700,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		146.245.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	6.357.350,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		6.780.375,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	6.275.500,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		6.589.275,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	-			90 %	16.663.939.777,29			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	-	17.407.352.967,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/ Bulan	15.394.699.127,29	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		16.010.486.017,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	753.600.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		754.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	340.183.850,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		371.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	85.387.400,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		139.715.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	46.226.400,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		46.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Pemeriksa an				1 Dokumen	15.961.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an Tata kelola Pem erintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		41.747.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	27.882.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an Tata kelola Pem erintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		26.014.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an Tata kelola Pem erintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		16.400.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD Pada PD yang Sesuai Ketentuan	-			100 %	69.723.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an Tata kelola Pem erintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	-	176.472.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an Tata kelola Pem erintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.730.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		48.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.657.350,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		30.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24.836.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		27.672.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-			81 Nilai Indeks	38.781.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	-	170.271.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5.350.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		7.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.029.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		10.060.830,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	71.743.500,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		123.492.210,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		39.381.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	33.600.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		33.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-			2 Nilai Indeks	539.516.820,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	-	542.016.820,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	300.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	390.055.200,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		390.055.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	-			0 Dokumen	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, Stakeholder Terkait	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, Stakeholder Terkait		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	-			100 %	41.137.350,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, Stakeholder Terkait	-	43.194.375,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	41.137.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, Stakeholder Terkait		43.194.375,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	-			0 Dokumen	0,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya															
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	-			100 %	115.380.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-		141.151.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA															
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	115.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait			141.151.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
3,	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						96.664.400,00						-		101.497.725,00	
		[Meningkatkan Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	10	0	10	10	96.664.400,00	-	-	-	-	-	-		101.497.725,00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	-			100 Persen	35.756.850,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-	37.544.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				4 Laporan	35.756.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		37.544.850,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				4 laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Pemmasalahan Pengendalian Harga dan Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	-			100 %	1.436.917.100,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-	1.571.786.155,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				4 Laporan	150.845.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		158.388.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				6 Laporan	1.286.071.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		1.413.397.855,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	-			90 %	35.032.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-	36.784.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestsida														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestsida				1 Laporan	35.032.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		36.784.125,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
5,	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						525.454.500,00						-	551.727.750,00	
		[Meningkatnya Nilai Ekspor]	Nilai Ekspor Barang	29622.70	21337.24	23470.96	25818.06	525.454.500,00	-	-	-	-	-	-	551.727.750,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah laporan promosi produk Unggulan Sulawesi Tengah	-			1 Laporan	525.454.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-	551.727.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				9 Pelaku Usaha	179.826.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		195.658.050,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	252.168.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		257.936.175,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				0 Pelaku Usaha	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				2 Produk	93.460.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		98.133.525,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
6,	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						274.833.050,00					-	131.075.700,00		
		[Meningkatkan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri]	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	10	0	10	10	274.833.050,00	-	-	-	-	-	-	131.075.700,00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT-COME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	399.960.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		420.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	77.839.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		81.732.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	376.984.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		415.834.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	79.468.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		83.442.450,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
2,	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						105.945.900,00						-	111.243.300,00	
		[Meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian]	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	0	100	100	105.945.900,00	-	-	-	-	-	-	111.243.300,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	-			100 %	105.945.900,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur	-	111.243.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	39.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		55.621.650,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemeintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	66.354.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		55.621.650,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
3,	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						44.257.700,00						-	96.471.425,00	
		[Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri]	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	94	88	89	90	44.257.700,00	-	-	-	-	-	-	96.471.425,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						647.261.351,00						-	793.915.929,00	
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	76.61	76.61	85	647.261.351,00	-	-	-	-	-	-	793.915.929,00	-
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	-			95 %	186.870.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB	-	284.430.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	186.870.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		284.430.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
		-	-	-	-	-	-	647.261.351,00	-	-	-	-	-	-	793.915.929,00	-
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB	-	0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.287.173,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		3.237.246,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.842.640,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		49.011.735,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.086.350,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		31.310.300,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	18.846.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		89.367.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB	-	0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)	
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB			0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB			0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB			0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	317.479.188,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB	-	234.109.648,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.688.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		15.498.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	254.935.536,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		168.737.496,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	49.855.652,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		49.874.152,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	85.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB	-	102.450.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	44.090.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		4.050.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		48.600.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	41.760.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		49.800.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. PSMB		0,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
2,	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						445.061.679,00						-	466.716.850,00	
		[Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk]	Persentase Layanan Pengauditan dan Kalibrasi yang Terakreditasi dan Non Akreditasi	91	83	86	87	445.061.679,00	-	-	-	-	-	-	466.716.850,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kalibrasi alat ukur ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI) Persentase pengujian komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	-			100 % 100 %	445.061.679,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait	-	466.716.850,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				370 Sertifikat	147.530.200,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		127.532.075,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				478 laporan	218.897.967,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		213.140.150,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				3 Produk	58.940.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		80.406.375,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
	3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi														
			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan				1 Sertifikat	19.692.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait		45.638.250,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB)
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
NO	KODE					2025	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)							1.479.112.736,00						1.564.814.623,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.479.112.736,00							1.564.814.623,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						842.953.586,00							896.846.623,00	
1,	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						842.953.586,00						-	896.846.623,00	
		[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	98	89.54	90	92	842.953.586,00	-	-	-	-	-	-	896.846.623,00	-
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	-			95 %	504.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	504.900.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	504.900.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		504.900.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
		-	-	-	-	-	-	842.953.586,00	-	-	-	-	-	-	896.846.623,00	-
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	98	89.54	90	92	842.953.586,00	-	-	-	-	-	-	896.846.623,00	-
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	-			1 Laporan	33.181.228,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	64.486.765,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	738.378,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		1.582.965,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)	
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	21.125.550,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		33.848.800,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)	
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)	
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.477.300,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		5.900.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	8.840.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		12.805.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		10.350.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN AN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	184.411.858,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	184.411.858,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	149.411.858,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		149.411.858,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		35.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	120.460.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK	-	143.048.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	75.040.500,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		81.048.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	45.420.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		62.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2IPK		0,00	UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK)
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
		[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.94	78.44	78.69	78.94	355.915.200,00	-	-	-	-	-	-	394.846.250,00	-
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K	-	0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	-			1 Laporan	26.746.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K	-	57.364.500,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.693.500,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		19.194.350,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.743.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		4.010.150,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	15.310.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		34.160.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0 Laporan	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K	-	0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	48.606.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K	-	50.969.850,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	47.256.800,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		49.619.850,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.350.000,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		1.350.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan	48.601.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K	-	54.551.900,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	26.856.900,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		30.856.900,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	UPT. P2K		0,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-			100 %	965.669.650,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait	-	961.453.500,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				4 BPSK	918.099.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait		917.108.325,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				1 LPKSM	17.319.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait		25.056.675,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				46 Pengaduan	30.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait		19.288.500,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-			80 %	114.618.200,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait	-	120.330.525,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				2 Laporan	75.403.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait		79.154.775,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			Jumlah Kasus yang Ditangani				9 Kasus	39.214.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengemba ngan wilayah sebagai pusat pertu mbuhan ekonomi	Aparatur, Pelaku Usaha, masyarakat, BPSK, LPKSM, stakeholder terkait		41.175.750,00	UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	J U M L A H							26.119.698.093,29						28.224.952.559,00		

Palu,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

RICHARD ARNALDO, SE, M.SA
Pembina Utama Madya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2026

4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan tahun 2026 melalui insiatif dari Kabupaten/Kota, umumnya merupakan usulan para pemangku kepentingan dan wakil masyarakat dan instansi terkait lainnya yaitu guna memudahkan dan membantu pelaku usaha dalam peningkatan daya saing usaha dan peningkatan IKM serta perlindungan konsumen bagi masyarakat. Adapun usulan program/kegiatan kabupaten/kota Tahun 2026 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Usulan Program/Kegiatan
Kabupaten / Kota Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Volume	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Keg. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terlaksananya Pasar Murah	1 Kegiatan	Kab. Banggai	Pasar Murah akan dilaksanakan Jika Terjadi gejala harga Inflasi, Meningkatkan daya beli, dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan
	Keg. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Industri Kerajinan melalui Dekranasda	1 Kegiatan	Kota Palu	Menunggu Usulan DAK
		Terlaksananya Pembentukan dan pembinaan sentra	1 Kegiatan	Kota Palu	Menunggu Usulan DAK
	Keg. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Terlaksananya Pelatihan terkait TKDN bagi IKM	3 Kegiatan	Kota Palu	
		Terlaksananya Pelatihan SIINas bagi Pelaku Usaha	3 Kegiatan	Kota Palu	
		Terlaksananya Pelatihan Penerapan wajib SNI bagi Industri Air Minum dalam Kemasan dan IKM oalahn Makanan	3 Kegiatan	Kota Palu	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5.3 Rencana tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Palu, 28 Juli 2025

**Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,**



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
NIP. 198211123 200604 1 006